

MITIGASI BENCANA BANJIR MELALUI PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Raisya Maharani
NPP. 32.0236

Asdaf Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik
Email: raisyamhrn6@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dedy Suhendi, S.Sos, M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Flood disasters often hit the city of Palembang, South Sumatra Province, caused by high rainfall, minimal infiltration land, and high development activities above critical water flow areas. As a result, the existing drainage system is unable to accommodate air runoff optimally, causing pooling and flooding in various areas of the city. **Objective:** This study aims to analyze flood mitigation through the utilization of Green Open Space (RTH) as a solution to reduce flood risk in the city of Palembang. Several previous studies have highlighted the importance of green open spaces in absorbing rainwater and reducing the risk of flooding, but its implementation in Palembang City has not been maximized. The main gap lies in the low management and maintenance of green open spaces that are not in accordance with their functional designation, as well as obstacles in the form of limited resources, lack of public awareness, and weak coordination between related agencies. In addition, there is still a lack of studies that comprehensively examine how flood mitigation through green open spaces can be optimized, as well as strategies to overcome existing obstacles, making this topic important to be studied in more depth. **Purpose:** This study aims to analyze flood mitigation through the utilization of Green Open Space (RTH) as a solution to reduce flood risk in Palembang City. **Method:** The research method used is a descriptive qualitative approach. Data were collected through interview techniques with local government officials and related parties, field observations at green open space locations, and documentation studies on spatial planning regulations and policies in Palembang City. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions based on field findings. **Results/Findings:** The results of the study indicate that the use of green open space as flood mitigation in Palembang City has been running quite well, especially through tree planting and the development of green space facilities that support water absorption functions. A total of 0.93 hectares of new green open space area spread across 27 locations. In addition, there are also 651,442 m² of retention pond area in Palembang City. However, its effectiveness has not been maximized because there are a number of obstacles, such as limited land and the amount of green open space area that is still lacking and has not reached the target, limited funding sources, and community participation that is not optimal in efforts to maintain and manage green open spaces. Until now, there are still 66 waterlogging points in Palembang City. However, its effectiveness has not been maximized because there are a number of obstacles, such as limited land and the amount

of green open space that is still lacking and has not reached the target, limited funding sources, and community participation that is not optimal in efforts to maintain and manage green open space. **Conclusion:** Based on the results of documentation, observation, and interviews with informants, flood mitigation through the utilization of green open space in Palembang City has been running well but has not been maximized. Efforts to overcome the obstacles that occur are optimizing existing green open spaces by improving their quality and function, and changing potential land that has not been utilized into green open spaces, utilizing CSR funds for green open space management, conducting socialization and education to the community, inviting the community to participate in maintenance, and approaching the community by utilizing local communities in communicating and selecting green open space plants that are in accordance with the environmental conditions of Palembang City.

Keywords: Flood, Green Open Space, Mitigation, Spatial Planning.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bencana banjir kerap melanda Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, minimnya lahan resapan, dan tingginya aktivitas pembangunan di atas kawasan aliran air yang kritis. Akibatnya, sistem drainase yang ada tidak mampu menampung limpasan air secara maksimal, sehingga menyebabkan genangan dan banjir di berbagai wilayah kota. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya RTH dalam menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir, namun penerapannya di Kota Palembang belum maksimal. Kesenjangan utama terletak pada rendahnya pengelolaan dan pemeliharaan RTH yang tidak sesuai dengan peruntukan fungsionalnya, serta adanya hambatan berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, masih minimnya studi yang mengkaji secara komprehensif bagaimana mitigasi banjir melalui RTH dapat dioptimalkan, serta strategi untuk mengatasi hambatan yang ada, menjadikan topik ini penting untuk diteliti lebih mendalam. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi banjir melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai solusi pengurangan resiko banjir di Kota Palembang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan pejabat pemerintah daerah dan pihak terkait, observasi lapangan di lokasi-lokasi RTH, serta studi dokumentasi mengenai regulasi dan kebijakan penataan ruang di Kota Palembang. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan RTH sebagai mitigasi banjir di Kota Palembang telah berjalan cukup baik, terutama melalui penanaman pohon dan pengembangan fasilitas ruang hijau yang mendukung fungsi resapan air. Sebanyak 0,93 hektare luas RTH baru yang tersebar di 27 lokasi. Selain itu juga ada 651.442 m² luas kolam retensi di Kota Palembang. Meski demikian, efektivitasnya belum maksimal karena terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan lahan dan jumlah luasan RTH yang masih kurang dan belum mencapai target, keterbatasan sumber dana, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam upaya pemeliharaan dan pengelolaan RTH. Hingga saat ini masih ada 66 titik genangan air di Kota Palembang. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan para informan maka mitigasi banjir

melalui pemanfaatan RTH di Kota Palembang telah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Upaya mengatasi hambatan yang terjadi yaitu, mengoptimalkan RTH yang ada dengan meningkatkan kualitas dan fungsinya, serta mengubah lahan potensial yang belum dimanfaatkan menjadi RTH, memanfaatkan dana CSR untuk pengelolaan RTH, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemeliharaan, serta mendekati masyarakat dengan memanfaatkan komunitas lokal dalam berkomunikasi serta pemilihan tanaman RTH yang sesuai dengan kondisi lingkungan Kota Palembang.

Kata kunci: Banjir, Mitigasi, Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia terletak secara astronomis antara $5^{\circ}54'08''$ LU– $11^{\circ}08'20''$ LS dan $95^{\circ}00'38''$ – $141^{\circ}01'12''$ BT, serta secara geografis berada di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Hindia dan Pasifik). Letaknya yang berada di kawasan "Ring of Fire" dan pertemuan tiga lempeng tektonik (Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik) menjadikannya negara yang rawan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang lebih luas dari daratannya, serta beriklim tropis dengan dua musim, Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana, baik alam, non-alam, maupun sosial. Di antara bencana alam tersebut, banjir merupakan yang paling sering terjadi, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk (Nakoe dan Lalu, 2022).

Bencana banjir dipengaruhi oleh dua indikator utama, yakni faktor alam dan faktor manusia. Secara alami, banjir dapat terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang melebihi kapasitas tampung sungai atau sistem drainase. Sementara itu, faktor manusia mencakup penggunaan lahan yang tidak sesuai, pembukaan hutan secara liar, kurangnya area resapan air, serta penyumbatan saluran akibat sampah. Risiko banjir semakin tinggi apabila elemen bencana dan tingkat kerentanan suatu wilayah saling berinteraksi. Tanpa penerapan strategi penanggulangan yang mencakup pendekatan struktural dan non-struktural, upaya pencegahan dan mitigasi banjir tidak akan berjalan secara efektif (Uca dan Maru, 2019).

Kota Palembang, yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan dan dikenal sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, kerap menghadapi bencana banjir. Wilayah kota ini didominasi oleh dataran rendah serta dialiri oleh banyak sungai dan kawasan rawa. Secara geografis, Palembang memiliki topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Keberadaan Sungai Musi yang membelah kota menjadi bagian utara (Seberang Ulu) dan selatan (Seberang Ilir) membuatnya sangat rentan terhadap banjir, terutama saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Sungai Musi juga dipengaruhi oleh pasang surut air, yang mempengaruhi tingkat air di sekitar kota (Baskoro dan Hertati, 2022). Dalam beberapa dekade terakhir, kejadian banjir di Palembang semakin sering dan intens, yang dipengaruhi oleh tingginya curah hujan, kerusakan lingkungan, serta pertumbuhan urbanisasi yang tidak diiringi dengan perencanaan tata kota yang memadai. Berdasarkan data Geoportal Kota Palembang tahun 2022, wilayah-wilayah rawan banjir telah dipetakan untuk menunjukkan area yang paling terdampak (Angrelia *et al.* 2020).

UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan tata ruang secara mandiri guna meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan banjir di Kota Palembang, diperlukan mitigasi yang tepat dan berkelanjutan. Melalui Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW 2012–2032, pemerintah kota memiliki wewenang dalam pengaturan zonasi wilayah untuk mendukung pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Noveck (2015) meskipun pemerintah merupakan pemangku kebijakan, namun sebagai pelayanan publik pemerintah tetap harus menekankan tiga dimensi antara lain transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Prabowo (2019) menjelaskan bahwa efektivitas bimbingan dan pengawasan pemerintah daerah sangat bergantung pada model yang tepat dalam pengelolaan dan kontrol lokal. Dalam konteks Indonesia, penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui struktur yang jelas dan mekanisme kontrol yang efektif sangat penting untuk mewujudkan kebijakan yang dapat merespons permasalahan daerah secara optimal. Hal ini juga relevan dalam upaya mitigasi bencana, seperti banjir, di mana pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi ruang terbuka dalam mencegah dampak bencana tersebut.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran vital dalam tata ruang kota, terutama dalam menyerap air hujan dan mencegah banjir. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022, RTH didefinisikan sebagai area terbuka yang ditumbuhi tanaman dan wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari strategi mitigasi banjir dan pengendalian emisi karbon. Menurut Hasni (2010), RTH mencakup berbagai kawasan seperti taman kota, hutan kota, area olahraga, pemakaman, hingga jalur hijau. Selain sebagai area resapan air, RTH juga meningkatkan kualitas air tanah, mengurangi polusi udara, mengatur iklim mikro, dan menyediakan ruang rekreasi. Namun, dalam praktiknya, RTH masih sering diabaikan dalam perencanaan tata ruang, padahal keberadaannya sangat penting dalam mengatasi permasalahan banjir dan perubahan iklim, termasuk di Kota Palembang yang pada 2023 mencatat capaian tertentu dalam penyediaan RTH. Berikut sebaran RTH di Kota Palembang:

Tabel 1.
Jenis dan Luasan RTH Kota Palembang Tahun 2023

No	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luas (Ha)
1	Pulau Taman	2,15
2	Taman Median	21,68
3	Taman Bahu Jalan	5,51
4	Taman Pasif	21,37
5	Taman Interaktif	72,45
6	Hutan Kota	55,77
7	RTH Lainnya	3.425,56
8	Pemukaman	178,31
9	Jalur Hijau (Bahu Jalan kanan-kiri)	477,23
10	Penambahan Taman tahun 2021	0,3621
11	Penambahan Taman tahun 2022	0,0025
12	Penambahan Taman tahun 2023	0,9315
Total Luas		4.261,32
Persentase dari luas Kota Palembang : 35.251 Ha		12,09%

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang (2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Kota Palembang mempunyai luas sebesar 35.251 Ha dengan luas RTH yaitu 4.261,32 Ha atau 12,09% dari luas Kota Palembang. Menurut Laporan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2023, Pemerintah Kota Palembang mengalokasikan anggaran sebesar Rp147.617.270.318 untuk Program Pengelolaan RTH

Peraturan daerah mengamanatkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus merumuskan rencana strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi SKPD harus mendukung visi kepala daerah melalui kebijakan dan program yang relevan dengan bidangnya, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah (Soleh dan Suropto, 2011). Dalam konteks ini, Dinas Perkimtan Palembang menjadikan kebijakan tersebut sebagai landasan dalam pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya mitigasi banjir. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik ini dalam skripsi berjudul “Mitigasi Bencana Banjir Melalui Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Banjir di Kota Palembang merupakan masalah yang terus meningkat, terutama akibat urbanisasi yang pesat dan perencanaan tata ruang yang kurang optimal. Meskipun Ruang Terbuka Hijau (RTH) diakui sebagai salah satu solusi mitigasi banjir yang efektif, pemanfaatannya di Palembang masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya RTH dalam menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir, namun penerapannya di Kota Palembang belum maksimal. Kesenjangan utama terletak pada rendahnya pengelolaan dan pemeliharaan RTH yang tidak sesuai dengan peruntukan fungsionalnya, serta adanya hambatan berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, masih minimnya studi yang mengkaji secara komprehensif bagaimana mitigasi banjir melalui RTH dapat dioptimalkan, serta strategi untuk mengatasi hambatan yang ada, menjadikan topik ini penting untuk diteliti lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara detail mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan RTH, faktor penghambat yang dihadapi, serta upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut di Kota Palembang..

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti membutuhkan informasi yang diperoleh dari studi-studi sebelumnya. Kajian terhadap penelitian terdahulu memegang peranan penting dalam proses penelitian karena dapat membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai topik yang akan dikaji serta memperluas wawasan dan pengetahuan terkait dengan subjek penelitian tersebut. Dalam menyusun penelitian mengenai mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang, kajian terhadap penelitian terdahulu sangat penting untuk memberikan landasan teori dan perbandingan hasil. Beberapa penelitian yang relevan telah dilakukan di berbagai daerah dengan fokus pada mitigasi banjir dan peran RTH sebagai salah satu upaya pencegahan. Araba (2019) mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi yang efektif menjadi

faktor kunci dalam meningkatkan pelayanan publik, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengelolaan dan pemanfaatan RTH secara optimal. Selain itu, Wargadinata (2017) menyoroti pentingnya kualitas pengukuran kinerja organisasi publik untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengurangi risiko bencana, seperti banjir. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas organisasi publik melalui reformasi birokrasi dan evaluasi kinerja dapat mendukung upaya mitigasi bencana secara lebih terstruktur dan terencana. Dalam konteks mitigasi bencana banjir di Kota Palembang, kedua aspek tersebut, yakni reformasi birokrasi dan pengukuran kinerja, menjadi elemen penting untuk memastikan pemanfaatan RTH yang maksimal sebagai bagian dari strategi mitigasi.

Penelitian Fazlul Auwal (2024) membahas peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen dalam mitigasi bencana banjir. Penelitian ini menyoroti strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh BPBD dalam mengurangi dampak banjir, terutama melalui koordinasi antar lembaga dan pelibatan masyarakat. Temuan ini memberikan gambaran penting mengenai peran kelembagaan dalam mitigasi bencana yang dapat menjadi referensi untuk memperkuat sinergi antar instansi di Kota Palembang. Raditya (2023) dalam penelitiannya mengenai mitigasi bencana banjir bandang di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura menguraikan berbagai tindakan struktural dan non-struktural yang diterapkan untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Pendekatan yang digunakan meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir serta program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya kombinasi antara pendekatan fisik dan sosial dalam mitigasi bencana, yang juga relevan untuk diterapkan dalam konteks pengelolaan RTH di Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Urbanus, Sela, dan Tungka (2021) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengkaji mitigasi bencana banjir secara struktural dan non-struktural. Mereka menekankan bahwa keberhasilan mitigasi sangat bergantung pada pengelolaan lingkungan, termasuk pemanfaatan ruang terbuka hijau, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kawasan resapan air. Temuan ini mendukung pentingnya peran RTH dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan sebagai alat mitigasi yang efektif di wilayah perkotaan. Lebih lanjut, Anwar (2020) meneliti pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan mitigasi bencana. Dalam penelitian tersebut, ditekankan pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung upaya mitigasi, termasuk dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai langkah strategis untuk mengurangi dampak bencana.

Selain itu, Sanahan (2023) mengkaji tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Palembang. Penelitian ini menyoroti pentingnya sinergi dan koordinasi antar berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swasta, dalam mengelola risiko banjir secara terpadu. Pendekatan kolaboratif ini dianggap esensial untuk meningkatkan efektivitas mitigasi banjir, khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu ini memperkaya pemahaman mengenai berbagai aspek mitigasi banjir, mulai dari peran kelembagaan, kombinasi strategi mitigasi, pengelolaan lingkungan, aspek regulasi, hingga tata kelola kolaboratif. Temuan-temuan tersebut menjadi pijakan penting dalam penelitian ini untuk mengembangkan strategi mitigasi banjir yang efektif melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang, Provinsi

Sumatera Selatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang penting, terutama dalam mengkaji peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai strategi mitigasi bencana banjir di Kota Palembang, yang selama ini masih kurang mendapatkan perhatian komprehensif dalam konteks lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara kajian teori pemerintahan dan ilmu kebencanaan yang diaplikasikan secara spesifik pada implementasi RTH dalam pengelolaan risiko banjir di wilayah perkotaan dengan karakteristik geografis dan sosial yang unik. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis sebagai referensi dan pedoman bagi pengambil kebijakan, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang, dalam merumuskan program kerja dan kebijakan penanggulangan banjir yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga memperkaya khazanah ilmu pemerintahan dan kebencanaan dengan fokus pada konteks daerah yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan kajian bagi akademisi serta praktisi pemerintahan dalam upaya mitigasi bencana berbasis RTH di daerah tropis dan perkotaan.

1.5. Tujuan

Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan mitigasi banjir tersebut melalui RTH. Selanjutnya, penelitian ini berupaya mengetahui berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga pemanfaatan RTH dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pengendalian dan pencegahan bencana banjir di Kota Palembang.

II. METODE

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang. Menurut (Patton 2002) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci. Pendekatan penelitian adalah rencana dan tahapan penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan anggapan-anggapan yang luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data (Creswell, 2016). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena dalam kondisi alami serta fokus pada proses dan makna yang terkandung, bukan hanya data numerik, sehingga dapat menggambarkan kondisi nyata secara sistematis. Menurut Simangunsong (2017), data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif, di mana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari sumber primer melalui wawancara dengan para pejabat terkait, seperti Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang, Sekretaris Dinas Perkimtan, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR,

Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah, serta Kepala UPTD Urusan Pertamanan dan Pemakaman. Informan tersebut dipilih secara *purposive* karena memiliki otoritas dan pengetahuan mendalam yang relevan dengan pengelolaan RTH dan mitigasi banjir. Selain itu, teknik *snowball sampling* digunakan untuk memperluas jumlah informan dengan merujuk pada rekomendasi dari informan awal agar data yang diperoleh lebih lengkap dan representatif. Data sekunder juga digunakan sebagai pelengkap, berupa artikel, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini dipandang efektif untuk menggali informasi yang komprehensif dan kontekstual guna mendukung analisis mendalam tentang upaya mitigasi bencana banjir di wilayah studi.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, observasi, dan dokumen. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi rinci dari para informan yang telah ditentukan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan dan kondisi di lapangan, yang akan memberikan data kontekstual yang mendukung hasil wawancara. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer dengan bukti-bukti tertulis, seperti surat, arsip, foto, dan catatan kegiatan yang relevan dengan penelitian (Hasibuan et al., 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai Hasil penelitian ini dirumuskan berdasarkan data valid yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah secara sistematis dan dianalisis dengan mengacu pada teori mitigasi bencana banjir menurut Coppola (2007), yang membagi kegiatan mitigasi menjadi mitigasi struktural dan non-struktural. Peneliti menyajikan hasil dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan upaya mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang berdasarkan temuan lapangan. Menurut Coppola (2007), kegiatan mitigasi diterapkan untuk pengurangan kemungkinan atau konsekuensi dari suatu bahaya, dikelompokkan dalam dua kategori utama yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural.

3.1. Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural adalah upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak terkait melalui pembangunan atau perubahan lingkungan fisik dengan penerapan solusi rekayasa. Mitigasi struktural yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan mitigasi banjir melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang adalah dengan reboisasi, zonasi penggunaan lahan, penggunaan tanaman penutup tanah, pengembangan infrastruktur hijau, pembangunan kolam retensi.

Reboisasi merupakan upaya penanaman kembali pohon atau vegetasi pada lahan yang mengalami degradasi lingkungan atau deforestasi, dengan tujuan utama meningkatkan daya serap air, mengurangi limpasan air hujan, serta memperbaiki kondisi hidrologis wilayah. Pohon-pohon seperti trembesi, mahoni, dan beringin memiliki sistem perakaran yang kuat sehingga mampu meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah dan mengurangi risiko banjir. Selain manfaat ekologis, reboisasi juga membawa dampak sosial dan ekonomi melalui pengembangan agroforestri, wisata alam, serta hasil hutan non-kayu yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Bapak Muh.

Nur Hendratna, SE., MTP., menjelaskan bahwa reboisasi berperan besar dalam mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan kota, namun pelaksanaannya tidak instan dan membutuhkan waktu, anggaran, serta perawatan yang konsisten agar berdampak maksimal.

Dalam konteks mitigasi banjir di Kota Palembang, reboisasi telah menjadi bagian dari kebijakan Dinas Perkimtan melalui penanaman pohon di taman kota, jalur hijau, dan kawasan rawan banjir. Kepala Dinas, Bapak H. Agus Rizal, AP., M.Si., menambahkan bahwa selain meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), program ini dihadapkan pada tantangan utama seperti keterbatasan lahan akibat pesatnya alih fungsi lahan di perkotaan. Tipologi RTH sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 menjadi acuan penting untuk pelaksanaan reboisasi secara lebih fleksibel, tidak hanya terbatas pada taman kota, tetapi juga meliputi taman atap, taman vertikal, biopori, hingga kolam retensi. Meskipun tantangan seperti anggaran dan perawatan masih menjadi kendala, Pemerintah Kota Palembang terus mendorong keberlanjutan program reboisasi agar dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi risiko banjir dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hijau dan sejuk.

Zonasi penggunaan lahan menjadi salah satu strategi penting dalam mitigasi bencana banjir di Kota Palembang, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Agung Nugraha, S.IP, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Palembang, yang menyatakan bahwa regulasi terkait zonasi dan kriteria RTH telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 dan upaya pemenuhan target RTH juga dilakukan dengan menggabungkan Ruang Terbuka Biru (RTB) dan Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) karena keterbatasan lahan dan anggaran. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Akhmad Syajari, ST., M.Sc., M.Eng, selaku Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang, bahwa dalam Perda Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2022, setiap pengembang diwajibkan menyediakan prasarana dan RTH, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti alih fungsi lahan, pelanggaran oleh pengembang, dan resistensi masyarakat terhadap penertiban. Kedua narasumber menegaskan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, tantangan utama masih terletak pada penegakan aturan dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan serta memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS) untuk pemantauan zonasi dan RTH secara digital dan lebih efisien, guna memastikan bahwa keseimbangan ruang antara pembangunan dan lingkungan tetap terjaga sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko banjir.

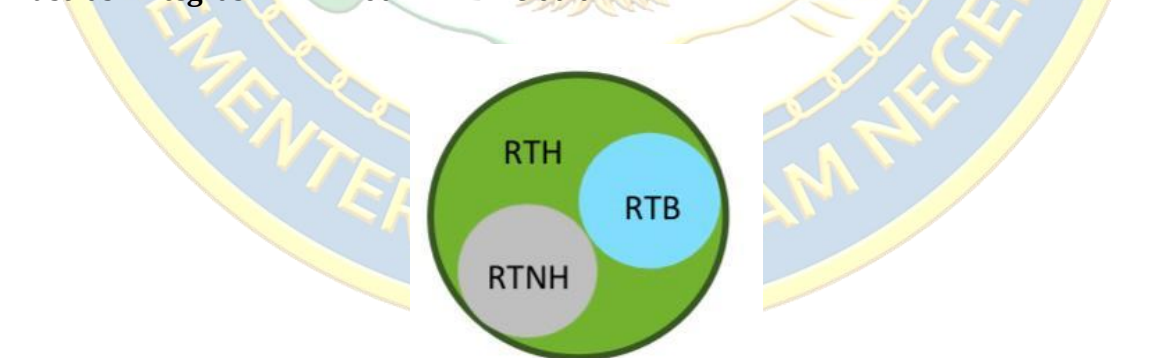
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Desi Muharman, S.Pd., M.Si selaku Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, serta Ibu Anggi Ersydiafni, ST selaku Kepala UPTD Pertamanan Dinas Perkimtan Kota Palembang, pemilihan jenis tanaman dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) difokuskan pada tanaman penutup tanah dan tanaman hias yang sesuai dengan kondisi iklim Kota Palembang yang panas. Tanaman seperti rumput lokal Paspalum, legum, serta semak lokal digunakan karena memiliki sistem perakaran padat yang mampu meningkatkan infiltrasi air, mengikat tanah, dan mencegah erosi di area rawan limpasan air. Sementara itu, pemilihan tanaman hias seperti bougainvillea dan bunga sepatu dilakukan tidak hanya berdasarkan ketahanan terhadap cuaca panas, tetapi juga untuk memperkuat aspek estetika taman kota. Kedua narasumber menyampaikan bahwa meskipun belum ada kebijakan spesifik mengenai jenis tanaman di RTH, pemilihan vegetasi dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan

fungsionalitas ekologis dan tampilan visual. Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi RTH sebagai area resapan air sekaligus memperindah lingkungan kota, serta mendukung mitigasi banjir di wilayah perkotaan.

Infrastruktur hijau di Kota Palembang telah diterapkan sebagai strategi mitigasi banjir dan peningkatan kualitas lingkungan melalui berbagai bentuk seperti taman kota, jalur hijau, lubang biopori, dan konsep green street yang mengintegrasikan vegetasi dengan infrastruktur jalan. Dalam wawancara, Kepala Dinas Perkimtan H. Agus Rizal, AP., M.Si menyampaikan bahwa penanaman pohon dan pembangunan lebih dari 3.000 lubang biopori dilakukan di titik rawan banjir untuk meningkatkan daya resap air dan mengurangi genangan, khususnya di kawasan seperti Simpang Polda. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Desi Muharman, S.Pd., M.Si dari Dinas Perkimtan yang menjelaskan pengembangan taman hujan dan taman kota seperti Kambang Iwak dan Taman Polda sebagai bagian dari infrastruktur hijau yang mendukung resapan air dan estetika kota. Upaya ini dilakukan untuk menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim, meskipun dihadapkan pada keterbatasan lahan dan anggaran. Pemerintah Kota Palembang terus berupaya memperluas implementasi infrastruktur hijau secara terencana dan berkelanjutan agar mampu mengurangi risiko banjir sekaligus memperkuat fungsi ekologis dan sosial ruang publik.

Kolam retensi merupakan elemen vital dalam sistem Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi menampung limpasan air hujan secara sementara guna mencegah terjadinya banjir di kawasan permukiman. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Pasal 3 Ayat 4 menyatakan bahwa penyediaan RTH dapat mencakup pemanfaatan Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB). Selanjutnya, Pasal 7 Ayat 7 secara khusus menegaskan bahwa kolam retensi termasuk dalam kategori RTB, yang memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan air dan pengendalian banjir di kawasan perkotaan secara ekologis dan terintegrasi.

Gambar 1
Ilustrasi Integrasi RTNH dan RTB ke dalam RTH



Sumber: Permen ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022

Kolam retensi merupakan salah satu strategi utama mitigasi banjir di Kota Palembang yang terintegrasi dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pendekatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB),

sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 2024. Dalam wawancara bersama para pejabat Dinas PUPR Kota Palembang, termasuk Kepala Bidang Penataan Ruang, Kepala Seksi Sumber Daya Air Irigasi dan Limbah, serta Kepala Bidang SDAIL, dijelaskan bahwa kolam retensi dibangun untuk menggantikan lahan resapan yang hilang akibat pembangunan, menampung limpasan air hujan, dan mengurangi genangan di 66 titik rawan banjir, seperti kawasan Polda, Basuki Rahmat, dan Angkatan 45. Saat ini, tercatat terdapat 49 kolam retensi dengan total luas 651.442 m², termasuk di taman kota seperti Kambang Iwak Park dan Taman Polda. Program ini telah membawa dampak positif bagi pengelolaan banjir, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan dukungan lintas sektor, sehingga kolaborasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dan sektor swasta sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

3.2 Mitigasi Non Struktural

Mitigasi non struktural didefinisikan sebagai langkah yang mengurangi risiko melalui modifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan penggunaan struktur rekayasa. Ini termasuk pembentukan peraturan undang-undang tentang penanggulangan bencana, perencanaan tata ruang yang aman, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan untuk menghadapi risiko bencana. Mitigasi non struktural yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan mitigasi banjir melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang adalah perencanaan tata ruang berbasis RTH, pemberdayaan masyarakat serta sosialisasi dan pelatihan masyarakat terkait mitigasi banjir

Perencanaan tata ruang di Kota Palembang menempatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai elemen penting dalam strategi pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana banjir. Berdasarkan wawancara dengan pejabat Dinas PUPR, seperti Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Kepala Bidang Penataan Ruang, ditegaskan bahwa minimal 30% dari luas wilayah kota harus dialokasikan untuk RTH, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 dan Nomor 5 Tahun 2024. Untuk mengatasi keterbatasan lahan, konsep RTH diperluas dengan mengintegrasikan Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) seperti sungai dan kolam retensi. Rencana penambahan RTH hingga tahun 2044 telah disusun, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi standar ekologis dan menyediakan ruang hijau yang mendukung resapan air, mengurangi risiko banjir, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah laju pembangunan kota.

Sosialisasi mitigasi banjir merupakan strategi penting yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang sebagai langkah preventif dalam mengurangi risiko bencana, khususnya banjir. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi Sumber Daya Air, Irigasi, dan Limbah Dinas PUPR Kota Palembang, kegiatan sosialisasi dilakukan secara tahunan di 18 kecamatan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan mendukung pengendalian banjir. Melalui pendekatan edukatif dan kekeluargaan, masyarakat dihibau untuk tidak membuang sampah sembarangan serta diajak memahami peran Ruang Terbuka Hijau (RTH), kolam retensi, dan tata ruang dalam menekan limpasan air. Evaluasi dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran warga, yang menjadi bukti bahwa sosialisasi berkontribusi besar dalam membentuk perilaku positif masyarakat terhadap

lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting dalam mitigasi banjir di Kota Palembang, di mana pemerintah melalui Dinas PUPR membentuk Komunitas Peduli Sungai Peduli Banjir dan Lingkungan yang kini telah mencapai 34 komunitas dengan 735 anggota tersebar di berbagai kelurahan. Komunitas ini bertugas memantau kondisi sungai, saluran air, serta ruang terbuka hijau, dan aktif melakukan kegiatan seperti gotong royong, pengerukan drainase, normalisasi sungai, hingga pembuatan eco enzyme dan pupuk organik dari sampah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi SDAIL Dinas PUPR Kota Palembang, komunitas ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penanggulangan banjir, sekaligus hasil nyata dari keberhasilan program sosialisasi lingkungan. Kegiatan ini tidak hanya mencegah banjir secara teknis, tetapi juga meningkatkan edukasi dan kepedulian warga terhadap lingkungan, sehingga mendorong kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kota yang lebih tahan banjir dan ramah lingkungan.

3.3 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Mitigasi Melalui Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang

Hambatan dalam mitigasi banjir melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang meliputi beberapa aspek utama. Pertama, keterbatasan lahan menjadi kendala besar karena perkembangan pesat kota menyebabkan banyak lahan hijau beralih fungsi menjadi permukiman dan kawasan bisnis, sehingga sulit untuk melakukan reboisasi secara maksimal (Agus Rizal, 2025). Kedua, keterbatasan anggaran menghambat pemeliharaan dan pengelolaan RTH, termasuk biaya untuk perawatan pohon yang sudah ditanam, sementara partisipasi masyarakat dalam merawatnya masih kurang optimal (Desi Muharman, 2025). Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi banjir dan fungsi RTH menyebabkan perilaku yang merugikan lingkungan seperti membuang sampah sembarangan dan mengalihfungsikan lahan resapan (Marlina Sylvia, 2025). Keempat, kendala regulasi dan pengawasan masih menjadi tantangan, di mana beberapa pengembang tidak mematuhi kewajiban penyediaan RTH dalam pembangunan, dan kurangnya koordinasi antarinstansi menghambat efektivitas penegakan aturan (Agung Nugraha, 2025). Terakhir, dampak perubahan iklim dengan intensitas curah hujan yang tinggi dan suhu udara meningkat menyebabkan siklus hidrologi menjadi tidak stabil, sehingga kemampuan RTH dalam menyerap air menurun (Desi Muharman, 2025). Meski demikian, pemerintah Kota Palembang tetap berkomitmen mengoptimalkan peran RTH melalui solusi inovatif dan kolaborasi berbagai pihak demi mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.

3.4 Upaya Mengatasi Hambatan Mitigasi Banjir Melalui Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Pemerintah Kota Palembang melakukan berbagai upaya mengatasi hambatan mitigasi banjir melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pertama, pemanfaatan maksimal RTH yang sudah ada menjadi prioritas utama karena keterbatasan lahan dan dana, dengan pengembangan taman vertikal dan penghijauan trotoar untuk meningkatkan fungsi resapan air dan kenyamanan masyarakat (Anggi Ersydiafni, 2025). Kedua, keterbatasan anggaran diatasi dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta guna

mendukung pengadaan dan pemeliharaan RTH, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan penghijauan dan perawatan (Marlina Sylvia, 2025). Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pelibatan aktif mereka dalam penanaman pohon, perawatan taman, dan gotong royong lingkungan menjadi kunci keberlangsungan RTH (Muh. Nur Hendratna, 2025). Emerson dan Nabatchi (2015) dalam teorinya tentang *Collaborative Governance* menjelaskan bahwa dinamika kolaborasi dalam suatu proses kolaboratif terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu *principled engagement* (keterlibatan yang berprinsip), *shared motivation* (motivasi bersama), dan *capacity for joint action* (kapasitas untuk melakukan aksi bersama). Keempat, penegakan kepatuhan terhadap regulasi seperti Perda Nomor 15 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2022 menjadi fokus pengawasan untuk memastikan zona hijau tidak dialihfungsikan, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran demi menjaga keberlanjutan RTH (Agung Nugraha, 2025). Kelima, pemilihan tanaman disesuaikan dengan kondisi iklim Palembang yang panas dan kering, dengan mempertimbangkan aspek estetika dan fungsi ekologis seperti daya tahan, sistem perakaran kuat, dan kemampuan menyerap air guna mendukung mitigasi banjir sekaligus memperindah lingkungan kota (Anggi Ersydiafni, 2025). Upaya terpadu ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi hambatan dan mengoptimalkan peran RTH sebagai bagian penting mitigasi banjir di Kota Palembang.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai strategi mitigasi bencana banjir di Kota Palembang memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas daya resap air di wilayah perkotaan. Temuan ini menunjukkan bahwa RTH, melalui fungsi vegetatifnya, dapat memperlambat aliran permukaan dan meningkatkan infiltrasi, meskipun efektivitasnya belum maksimal akibat keterbatasan lahan dan dana serta minimnya partisipasi masyarakat.

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Nadya Rahma Putri dan Hasni (2023), bahwa ketersediaan RTH yang masih jauh dari target minimal 30% menyebabkan tidak maksimalnya pencegahan banjir di Jakarta Barat. Penelitian ini juga menemukan bahwa Palembang baru mencapai 12,09% dari target RTH, sehingga perannya dalam mitigasi banjir belum optimal. Berbeda dengan temuan penelitian Revansyach H. C. Raditya (2023), yang menekankan bahwa relokasi lahan dan pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam mitigasi banjir bandang di Sentani, penelitian ini justru menekankan solusi berbasis ekologi melalui penguatan peran RTH tanpa relokasi besar-besaran. Ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik objek penelitian, yakni kondisi geografis dan jenis banjir yang berbeda.

Temuan ini memperkuat penelitian Ananda Urbanus et al. (2021) yang menyatakan bahwa mitigasi banjir akan efektif jika dikombinasikan antara pendekatan struktural dan non-struktural, termasuk peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kebijakan ruang hijau. Dalam konteks Kota Palembang, penelitian ini membuktikan bahwa meskipun pendekatan struktural dilakukan seperti kolam retensi dan sistem drainase, penguatan peran RTH tetap menjadi kebutuhan mendesak untuk menurunkan risiko banjir. Temuan ini juga menolak sebagian hasil dari penelitian Fazlul Auwal (2024) di Kabupaten Bireuen yang menyatakan bahwa peran utama dalam mitigasi banjir lebih efektif bila dipegang oleh BPBD melalui penanganan langsung seperti pembuatan beronjong atau pintu air. Di Kota Palembang, peran tersebut lebih dominan dilakukan oleh Dinas Perkimtan dan Dinas PUPR

yang mengelola ruang dan infrastruktur hijau sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan pemanfaatan dan penyediaan RTH dalam konteks perkotaan sebagai bagian dari mitigasi banjir yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa meskipun mitigasi banjir melalui RTH telah berjalan sesuai teori mitigasi struktural dan non-struktural menurut Coppola (2007), pelaksanaannya belum maksimal akibat berbagai hambatan, antara lain keterbatasan lahan akibat konversi menjadi permukiman dan kawasan komersial, kendala anggaran yang mengharuskan dukungan dana dari pemerintah pusat dan Corporate Social Responsibility (CSR), rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya RTH, ketidakpatuhan terhadap regulasi penyediaan RTH, serta faktor alam seperti curah hujan tinggi yang mengurangi efektivitas serapan air. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah mengoptimalkan fungsi RTH yang ada, mengkonversi lahan potensial menjadi RTH, memanfaatkan dana CSR, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, melibatkan komunitas lokal dalam pemeliharaan, serta memilih tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan Kota Palembang guna meningkatkan efektivitas mitigasi banjir. **Keterbatasan penelitian,** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam interpretasi hasil dan pengembangan studi lanjutan. Pertama, fokus penelitian hanya pada mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palembang, sehingga belum mencakup faktor-faktor lain yang juga berkontribusi terhadap mitigasi banjir seperti sistem drainase dan kebijakan tata ruang secara menyeluruh. Kedua, keterbatasan data terkait kuantitas dan kualitas RTH yang tersedia, serta tantangan dalam mengukur dampak langsung RTH terhadap pengurangan risiko banjir, menjadi kendala dalam memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Ketiga, partisipasi masyarakat sebagai salah satu variabel penting dalam penelitian ini masih belum dapat diukur secara mendalam dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, waktu penelitian yang terbatas juga membatasi kemampuan peneliti untuk memantau perkembangan dan efektivitas program mitigasi secara jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis dan menggunakan metode yang lebih beragam guna mendapatkan hasil yang lebih holistik dan aplikatif. **Arah masa depan penelitian,** Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diterapkan secara bertahap di Kota Palembang, termasuk peran kolaborasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi banjir. Studi masa depan juga dapat fokus pada pengembangan strategi sosialisasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya RTH. Selain itu, penelitian dapat mengkaji dampak langsung dari penerapan sanksi dan penghargaan dalam menjaga keberlanjutan RTH serta mengidentifikasi hambatan komunikasi dalam penyebaran informasi mitigasi bencana di berbagai lapisan masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Dinas Perkimtan Kota Palembang, Dinas PUPR Kota Palembang, serta para informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing, para pengajar, dan seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan, motivasi, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Tak lupa, saya menghargai segala bentuk dukungan dari keluarga, rekan mahasiswa, serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Angrelia, C., Prihata, R., Mubarak, A. C., & Utami, W. K. (2020). Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Banjir Tahun 2020. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.3060>
- Anwar, A. (2020). Pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan mitigasi bencana. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 45–60. <http://eprints.ipdn.ac.id/6000/3/JURNAL%20ADMINISTRASI%20PEMERINTAH%20DAERAH%20ANWAR.pdf>
- Auwal, F. (2024). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen Dalam Mitigasi Bencana Banjir*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry
- Baskoro, A. G., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tentang Penanganan Banjir di Desa Tropodo Kecamatan W.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Coppola, D. p. (2007). *Introduction to International Disaster Management* (J. Soucy & C. Pamela (eds.)). Elsevier.
- Emerson, K. dan T. Nabatchi. 2015. *Collaborative Governance Regimes*. Washington: Georgetown University Press.
- Daraba, D. (2019). *Reformasi birokrasi & pelayanan publik*.
- Hasni. (2010). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah* (Edisi Kedua). PT Rajagrafindo Persada.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January)
- Nadya, R. P., & Hasni. (2023). *Analisis Yuridis Ruang Terbuka Hijau terhadap Pencegahan Banjir di Sebagian Jakarta Barat*. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 10(2), 112–123.
- Nakoe, M. R., & Lalu, N. A. S. (2022). *Manajemen Bencana*. Duta Sablon.
- Noveck, B. S. (2015). *Smart citizens, smarter state: The technologies of expertise and the future of governing*. Cambridge: Harvard University Press.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Prabowo, H. (2019). Constructing the ideal model of local government guidance and control effectiveness in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*,

- 11(1), 1–20.
<http://eprints.ipdn.ac.id/5450/3/JURNAL%20AMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH%20HADI%20PRABOWO.pdf>
- Raditya, R. H. . (2023). *Mitigasi Bencana Banjir Bandang Distrik Sentani Kabupaten Jayapura*. Skripsi. Semarang: UNISSULA
- Samaham MG. Simbolon H. (2024) *Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*. Other thesis, IPDN.
- Simangunsong, S., Simamora & Dalilah, A. (2023). Manajemen Risiko Dalam Mengantisipasi Kejadian Bencana Di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Palembang. JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang), 18(1).
<https://doi.org/10.36086/jpp.v18i1.1664>
- Urbanus, A., Sela, R. L. E., & Tungka, A. E. (2021). *Mitigasi Bencana Banjir Struktural dan Non Struktural Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. Jurnal Spasial, 8(3), 447–458.
- Uca, & Maru, R. (2019). *Mitigasi bencana : Pemetaan dan Zonasi Daerah Rawan Longsor dan Banjir*. Media Nusa Creative.
- Wargadinata, E. L. (2017). Kualitas pengukuran kinerja organisasi publik. *Sosiohumaniora*, 19(2), 86–94.

